

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KINERJA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU**

*THE EFFECT OF MODERNIZATION ON TAX ADMINISTRATION TO PERFORMANCE OF PRATAMA TAX  
SERVICE OFFICE KOTAMOBAGU*

Oleh:

**Chyntia Magdalena Polii<sup>1</sup>  
Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email:

<sup>1</sup>[chyntiapolii@gmail.com](mailto:chyntiapolii@gmail.com)

<sup>2</sup>[julliesondakh@yahoo.com](mailto:julliesondakh@yahoo.com)

**ABSTRAK** :Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi Negara serta masyarakatnya. Seiring berjalannya waktu Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Merealisasikan modernisasi administrasi perpajakan yang lebih baik tentunya Direktorat Jenderal Pajak harus berusaha agar kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak lebih ditingkatkan lagi. Program modernisasi ini telah dilaksanakan di semua Kantor Pelayanan Pajak, itupun berlaku untuk KPP Pratama Kotamobagu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja KPP Pratama Kotamobagu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, sampel 46 yang diambil dari seluruh populasi pegawai yang ada di KPP Pratama Kotamobagu. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dan dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kinerja KPP Pratama di Kotamobagu.

**Kata Kunci:** *Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kinerja.*

**ABSTRACT** :*Taxes are dynamic and follow the social and economic development of the State and its people. Over time the Directorate General of Taxation feels the need to develop and perfect the organizational structure, the establishment of office, and the application of modern systems. To realize the modernization of tax administration is better of course the Directorate General of Taxation should strive for the performance of the Tax Office more upgraded. This modernization program has been implemented in all Tax Office, and even then apply to KPP Pratama Kotamobagu. The purpose of this research is to know the influence of modernization of tax administration covering organizational structure, business process and information technology, improvement of human resource management, and implementation of good governance to KPP Pratama Kotamobagu performance. The research method used is quantitative research, 46 samples taken from the entire population of employees in KPP Pratama Kotamobagu. Hypothesis testing results obtained  $t_{count} > t_{tabel}$  which means  $H_0$  rejected and  $H_a$  accepted, and it can be concluded that the modernization of tax administration affect the performance of KPP Pratama in Kotamobagu.*

**Keywords:** *Modernization of Tax Administration, Performance.*

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi Negara serta masyarakatnya (Andriyaningrum, 2015). Kehidupan sosial perekonomian masyarakat selalu mengalami perubahan, hal ini membuat perbaikan dan perubahan dalam segala aspek perpajakan perlu dilakukan (Christanti, 2016). Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola perpajakan Indonesia pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan melalui sektor pajak. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga Negara yang baik dan untuk mewujudkannya maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan peningkatan terhadap *Good Governance* dan pelayanan prima (*Service Excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan program perubahan Reformasi Perpajakan Indonesia.

Reformasi Perpajakan di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan (*Change Program*) atau Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ditandai dengan pengorganisasian Kantor Pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis pajak, hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan, adanya kejelasan fungsi dan tanggung jawab organisasi. Selain itu, sistem administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi sehingga meningkatkan keefisienan juga untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, disusun SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk masing-masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menerapkan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, *online payment*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration*, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Terebosan teknologi informasi yang baru yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela dan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan serta meningkatkan produktivitas aparat pajak. Karena teknologi informasi yang canggih merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Untuk merealisasikan modernisasi administrasi perpajakan yang lebih baik tentunya Direktorat Jenderal Pajak harus berusaha agar kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak lebih ditingkatkan lagi.

Kinerja institusi dan pegawai merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika pegawai berhasil membawa kemajuan bagi institusi, keuntungan yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah pihak (Gultom, 2015). Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, *capable* dan berintegritas. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak dalam mewujudkan penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *Account Representative* dan *Complaint Center* untuk menampung keberatan wajib pajak, pembuatan dan penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik pegawai tersebut.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

---

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak membahas peraturan perpajakan, serta transaksi akuntansi penting yang berkaitan dengan tujuan menentukan pajak minimum yang dapat dicapai dalam batas-batas yang diperkenankan oleh undang-undang atau peraturan perpajakan (Suwardjono, 2013:39).

**Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Administrasi Perpajakan**

Menurut Lumbatoruan yang telah dikutip oleh Rahayu dan Lingga (2009) administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Kegiatan administrasi perpajakan sendiri merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi, seperti mendaftarkan wajib pajak, menyediakan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, menagih pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan wajib pajak, menghapuskan hutang pajak (Palupi, 2010).

**Reformasi Administrasi Perpajakan**

Reformasi perpajakan hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan perpajakan dilakukan secara bertahap dan mencakup seluruh aspek di bidang perpajakan. Sari (2013:8) mengemukakan secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

1. Bidang administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan;
2. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang perpajakan; dan
3. Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

Sari (2013:8) menyatakan bahwa reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan peningkatan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan aparat pajak. Wajib pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan aparat pajak diharapkan selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang handal dan terkini (Nasucha, dikutip dalam Wijayanti, 2010).

**Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Modernisasi administrasi perpajakan menurut Khasanah (2014) adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak Negara. Konsep dari program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Sasaran penerapan modernisasi administrasi perpajakan menurut Sari (2013:19) adalah:

1. Memaksimalisasi penerimaan pajak;
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa DJP mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi;
4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
5. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional;

6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
7. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan;
8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang (Sari, 2013:15):

1. Struktur Organisasi
2. *Business Process* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Pelaksanaan *Good Governance*.

### Tujuan dan Manfaat Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sari (2013:19) mengemukakan tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi;
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi;
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Sari (2013:18) mengemukakan program modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi wajib pajak sebagai berikut:

1. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui:
  - a. Konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB dan BPHTB)
  - b. Adanya tenaga *Account Representative* (AR) dengan tugas antara lain:
    - 1) Konsultasi untuk membantu wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya,
    - 2) Mengingatkan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya,
    - 3) *Update* atas peraturan perpajakan yang terbaru.
2. Pemanfaatan IT secara maksimal: email, e-SPT, e-filing, dll.
3. SDM yang professional
  - a. Adanya *fit and proper test* dan *competency mapping*
  - b. Pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten
  - c. Pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi)
4. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan professional dengan konsep spesialisasi penerapan.
5. Penerapan dan penegakan *Good Governance* di semua lini.

### Pengertian Kinerja

Menurut PP No.8 Tahun 2006 Pasal 1 (2) kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Mahsun dalam Hidayati (2014) kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja, dan suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan.

### Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (2007) dalam Nordiawan dan Hertianti (2010:158) yaitu:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*)
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

### **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan berpedoman pada konsep *value for money* yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah (Mardiasmo, 2009:131).

### **Penelitian Terdahulu**

Dianasari dan Rima Rachmawati (2010) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencapaian Akuntabilitas Pada KPP Modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan modernisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern di Bandung telah diaplikasikan secara tepat dalam pencapaian akuntabilitas. Jenis Penelitian deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan modernisasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencapaian akuntabilitas.

Nur Firdausih Sahudin (2016) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya meneliti mengenai kinerja pegawai sedangkan pada penelitian ini mengenai kinerja dari KPP.

### **Hipotesis**

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, gejala-gejala, atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi (Taniredja dan Mustafidah, 2013:59). Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir penelitian, maka dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

1. Modernisasi administrasi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survey. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2016:8). Bentuk penelitian survey yaitu melakukan pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner dan wawancara terstruktur.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. KPP Pratama Kotamobagu berlokasi di Jalan Yusuf Hasiru No.39 Kotobangon, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Dengan waktu penelitian dimulai sejak bulan Maret 2017 – April 2017.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian awal
2. Pengambilan data (Populasi dan Sampel)
3. Penyebaran Kuesioner
4. Melakukan pengelolaan data yang sesuai dengan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini dan melakukan analisis statistik dengan bantuan *Software Program SPSS Version 23 For Windows*;

5. Mengkaji dan membahas kembali hasil
6. Kesimpulan dan saran.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Lapangan
  - a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu
  - b. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh pertanyaan yang sudah di susun. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini kuesioner ditujukan kepada pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu
2. Studi Kepustakaan  
Yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis statistik dengan menggunakan bantuan *Software Program SPSS*. Analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan empat tahap. Tahap pertama, pengujian kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Tahap kedua, melakukan uji penyimpangan asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Tahap ketiga, melakukan analisis regresi, dan tahap keempat, melakukan uji hipotesis.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

**Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Indikator	No. Pernyataan	Skala Pengukuran
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X), pertanyaan kuesioner diadopsi dari penelitian Nur Firdausih Sahudin (2016)	1. Struktur Organisasi	1-3	Likert
	2. <i>Business Process</i> dan Tegnologi Informasi	4-8	
	3. Penyempurnaan Manajemen Sumber daya Manusia	9-11	
	4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	12-15	
Kinerja (Y), pertanyaan kuesioner diadopsi dari penelitian Eneng Susanti (2010)	1. Ekonomi	1-2	Likert
	2. Efisien	3-4	
	3. Efektivitas	5-10	

Sumber: Data Olahan 2017

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil penelitian yang diperoleh dari distribusi kuesioner kepada pegawai fungsional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Dari 52 kuesioner yang didistribusikan, jumlah kuesioner yang dikembalikan hanya 46 kuesioner sehingga jumlah responden pada penelitian ini adalah sebanyak 46 responden.

**Uji Validitas****Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X)	1	0,665	0,291	Valid
	2	0,707	0,291	Valid
	3	0,652	0,291	Valid
	4	0,831	0,291	Valid
	5	0,672	0,291	Valid
	6	0,695	0,291	Valid
	7	0,434	0,291	Valid
	8	0,790	0,291	Valid
	9	0,514	0,291	Valid
	10	0,691	0,291	Valid
	11	0,729	0,291	Valid
	12	0,671	0,291	Valid
	13	0,636	0,291	Valid
	14	0,603	0,291	Valid
	15	0,613	0,291	Valid
Kinerja (Y)	1	0,720	0,291	Valid
	2	0,814	0,291	Valid
	3	0,697	0,291	Valid
	4	0,802	0,291	Valid
	5	0,482	0,291	Valid
	6	0,653	0,291	Valid
	7	0,764	0,291	Valid
	8	0,731	0,291	Valid
	9	0,810	0,291	Valid
	10	0,696	0,291	Valid

Sumber: Data Olahan 2017.

Berdasarkan data yang sudah diolah, bisa dilihat pada tabel 2, nilai r-tabel dengan  $n=46$  dan pada signifikan 0,05 adalah sebesar 0,291 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pertanyaan dari variabel X dan Y adalah valid, karena nilai semua hubungan pertanyaan lebih dari 0,291.

**Uji Reliabilitas****Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X)	0,759	Reliabel
Kinerja (Y)	0,770	Reliabel

Sumber: Data Olahan 2017.

Berdasarkan tabel 3 hasil uji reliabilitas diatas, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,600 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan handal atau reliabel

**Analisis Regresi Linear Sederhana**

**Tabel 4. Uji Regresi Linear Sederhana**

		Coefficients				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.532	4.145		1.815	.076
	X	.545	.064	.789	8.526	.000

a. Dependent Variable: Y  
 Sumber: Output SPSS 23 2017.

$Y = 7,523 + 0,545 X$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, nilai dari konstanta a = 7,523 menunjukkan bahwa jika tidak ada modernisasi administrasi perpajakan, maka kinerja KPP Pratama Kotamobagu akan tetap konstan sebesar 7,523. Untuk nilai dari koefisien regresi X sebesar 0,545 menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan modernisasi administrasi perpajakan satu satuan, akan diikuti dengan peningkatan kinerja KPP Pratama Kotamobagu sebesar 0,545. Dari hasil persamaan regresi diatas, nilai dari koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik modernisasi administrasi perpajakan akan membuat kinerja KPP Pratama Kotamobagu semakin meningkat.

**Uji T (Parsial)**

Dari hasil uji t pada tabel 4 di atas diketahui t hitung=8,526 dan t tabel=1,681. Jadi dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel maka H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, juga dapat dilihat dari hasil signifikan 0,00 < 0,05 maka H<sub>0</sub>

		Coefficients				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.532	4.145		1.815	.076
	X	.545	.064	.789	8.526	.000

a. Dependent Variable: Y  
 Sumber: Output SPSS 23 2017.

		Coefficients				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.532	4.145		1.815	.076
	X	.545	.064	.789	8.526	.000

a. Dependent Variable: Y  
 Sumber: Output SPSS 23 2017.

Pratama Kotamobagu.

ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, artinya variabel modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPP



**Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi****Tabel 5. Hasil Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789a	.623	.614	2.70172

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 23 2017.

Berdasarkan tabel 5 diperoleh angka R sebesar 0,789 yang berarti bahwa terjadi hubungan yang kuat antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja KPP Pratama Kotamobagu.

Hasil output *R Square* yang diperoleh sebesar 0,623 yang menunjukkan besarnya kontribusi seluruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kinerja KPP Pratama Kotamobagu adalah sebesar 62,3%, sedangkan 37,7% lainnya ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

Penelitian ini menguji Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja KPP Pratama Kotamobagu. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai koefisien regresi 0,545X yang berarti ada hubungan positif antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja KPP Pratama Kotamobagu yang menunjukkan apabila modernisasi administrasi perpajakan berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja KPP Pratama Kotamobagu.

Hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima, yaitu sebagai berikut:

$H_0$  : Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

$H_a$  :Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

Dari hasil uji t diketahui t hitung=8,526 dan t tabel=1,681. Jadi dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, juga dapat dilihat dari hasil signifikan  $0,00 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPP Pratama Kotamobagu. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja KPP Pratama Kotamobagu, menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja KPP Pratama Kotamobagu.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPP Pratama di Kotamobagu. Hal ini menunjukkan bahwa indikator modernisasi administrasi perpajakan yang berupa perubahan struktur organisasi, perbaikan *business process* dan teknologi informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* memiliki pengaruh yang kuat dalam peningkatan kinerja KPP Pratama Kotamobagu

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi instansi terkait dalam hal ini KPP Pratama Kotamobagu, penerapan modernisasi administrasi perpajakan berupa struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya dan pelaksanaan *good governance* memiliki pengaruh yang

- sangat baik terhadap peningkatan kinerja KPP Pratama di Kotamobagu, sehingga sekiranya pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait modernisasi administrasi perpajakan agar dapat menambah variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyaningrum, Melanie Aggraini. 2015. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Kerja Fiskus (Pegawai Pajak) (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung)*. Universitas Widyatama.
- Christanti, Fabiola Desylita. 2016. *Analisis Hubungan Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan Dengan Persepsi Pencapaian Akuntabilitas Pelayanan Publik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Dianasari, dan Rima Rachmawati. 2010. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencapaian Akuntabilitas Pada KPP Modern*. Universitas Widyatama Bandung. Bandung.
- Gultom, Katika E.V. 2015. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Penilaian Kinerja Pegawai Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)*. Universitas Widyatama Bandung. Bandung.
- Hidayati, Eti Wahyu. 2014. *Kinerja Tim Kerja Pemulihan Dieng Dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Dieng Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Khasanah, Septiyani Nur. 2014. *Pengaruh Pegetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Palupi, Endah. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rahayu, Sri dan Lingga Salsalina Ita. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 (119-138). Universitas Kristen Maranatha.
- Sahudin, Nur Firdausih. 2016. *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Makassar (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Makassar Utara)*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, Eneng. 2010. *Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kinerja di KPP Pratama Purwakarta*. Universitas Widyatama Bandung. Bandung.
- Suwardjono. 2013. *Akuntansi Pengantar*. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.

Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2015. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Wijayanti, Tuti. 2010. *Pengaruh Reformasi Perpajakan dari Segi Modernisasi Prosedur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak di Wilayah Surakarta)*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PP No.8 Tahun 2006 Pasal 1 (2) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

